

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUKMA NAISILA



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

SUKMA NAISILA

A011191174



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh:

SUKMA NAISILA
A011191174

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 12 September 2023

Pembimbing Utama



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D.
NIP. 19610806 198903 1 004

Pembimbing Pendamping



Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si
NIP. 19590303 1988101 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

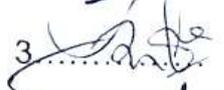
Disusun dan diajukan oleh

SUKMA NAISILA

A011191174

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 12 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitian Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D	Ketua	1..... 
2	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM	Anggota	3..... 
4	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa = Sukma Naisila

Nomor Pokok = A011191174

Program Studi = Ilmu Ekonomi

Jenjang = Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri yang tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Oktober 2023

Yang menyatakan



Sukma Naisila
A011191174

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan”** yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana ekonomi dalam Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, tidak terhindar dari berbagai hambatan dan kesulitan. Dengan rendah hati, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berharga di sisi-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Superhero dan panutanku, Ayahanda Sulhang. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau

mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Pintu surgaku dan malaikatku, Ibunda Kasmawati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk adikku, Jumaswar, kamal, Salsabila Fajriani, Syahlaa Sepnia Sulham dan Syakib Fahreza Sulham. Terima kasih sudah menjadi Mood boster dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah setelah beberapa tahun meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., CWM®, CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Sabir, S.E., Msi., CWM®. Selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
6. Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF. Selaku penasihat akademik penulis juga pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi. Terima kasih telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.Ph.D. Selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan

dan bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

8. Bapak Dr. Sanusi Fattah SE., M.Si., CSF., CWM® dan Bapak Dr. Sultan Suhab SE., M.Si. Selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi penulis untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin secara umum, dan kepada Bapak Ibu dosen Jurusan Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada penulis selama menjalani masa studi.
10. Segenap Pegawai Akademik dan Kemahasiswaan FEB-UH yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
11. Sahabatku Nurfasrina, Nurul Asirah, Wilya Pratiwi, Besse Hastuti, Abdul Samha, Fadli, Rahmat Hidayat, dan Muh. Dzulfianugrah. Terima kasih kebersamaannya sejak maba hingga saat ini, atas segala bantuannya bagi penulis. Suka dan duka yang tercipta selama ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis karena kalian adalah sahabat, keluarga serta rumah bagi penulis. Semoga pertemanan ini abadi.
12. Gadisku Dewi Sukma Saleh dan Nhirfana Dillah Suardi. Terima kasih telah menemani penulis, memberikan support dan kehangatan dan menjadi sahabat bagi penulis di perantauan. Semoga seterusnya kita terus menjalin pertemanan hingga tua nanti.
13. Teman-teman Griffins 19 dan keluarga besar HIMAJIE. Yang selalu berbagi canda dan tawa selama mengikuti perkuliahan.

14. Teman-teman satu daerah perantauan IKMB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bone). Terima kasih sudah menjadi wadah yang memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
15. Kesayanganku Musdalifah, Arfiana Safitri, dan Ainun Syarfiah. Terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu menjadi motivator terbaik.
16. Teman-teman KKN Tematik Gel.108 Perhutanan Sosial Bone, posko 10 Bone. Hafiz Mohammad Iskandar, A. Amal Makkuaseng, Ahmad Zulfikar, Chaerun Fitra Arisanni, Nayni Amrayni, Nurmaifah, Nursakina, Nur Halisa, Nurvitasari dan Nurul Hikmah Agustina. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, penyemangat serta telah menjadi pelangi yang mewarnai kehidupan penulis selama KKN dan sudah menjadi keluarga yang selalu ada disaat duka maupun duka.
17. Sahabat-sahabatku SGR Kenangan, Rani Wulandari Sari, Rini Aminarti, Warda, Niska, Hastuti, dan Rahmawati. Terima kasih selalu senantiasa memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-temanku SMAPLAS-UH, Subir, Nurul Asirah, Ainun Syarfiah, Lusiana Syam, Muhammad Pahri, Saiful, dan Abdullah Fahim. Terima kasih sudah kebersamai dan berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini.
19. Sahabatku D'mitri Amstrem. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
20. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat atau berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum (pembaca) terutama bagi penulis sendiri. Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Makassar, 23 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sukma Naisila', written in a cursive style.

Sukma Naisila

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sukma Naisila
Yusri Zamhuri
Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari hasil pencatatan sistematis berupa runtun waktu (time series) selama periode 2013-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Badan Keuangan & Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung belanja modal bidang infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara belanja modal bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, hubungan belanja modal bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Belanja Modal, IPM, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRAK

THE IMPACT OF CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Sukma Naisila
Yusri Zamhuri
Bakhtiar Mustari

This research aims to determine the influence of capital expenditure in the fields of infrastructure, education, and health on economic growth, both directly and indirectly through the Human Development Index (HDI) in South Sulawesi Province. All the data used in this research are secondary data obtained from systematic time series records for the period 2013-2022, sourced from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik or BPS), Bank Indonesia, and the Regional Finance and Asset Agency (Badan Keuangan & Aset Daerah or BKAD) of South Sulawesi Province. The data analysis method used is path analysis, an extension of multiple linear regression analysis. The research results show that, directly, capital expenditure in the fields of infrastructure and education has a significant negative impact on economic growth, while capital expenditure in the field of health does not have a significant impact on economic growth in South Sulawesi Province. Meanwhile, the indirect relationship between capital expenditure in the fields of infrastructure, education, and health on economic growth through the Human Development Index (HDI) does not have a significant impact on economic growth in South Sulawesi Province.

Kerwords: Capital Expenditure, HDI, Economic Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PESETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAKC	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II METODE PENELITIAN.....	12
2.1 Tinjauan Konseptual.....	12
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	18
2.1.4 Belanja Modal	20
2.1.5 Belanja Modal Bidang Infrastruktur	22
2.1.6 Belanja Modal Bidang Pendidikan.....	24
2.1.7 Belanja Modal Bidang Kesehatan	25
2.2 Hubungan Antar Variabel	26
2.2.1 Hubungan IPM dengan Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2.2 Hubungan Belanja Modal Bidang Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.2.3 Hubungan Belanja Modal Bidang Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.2.4 Hubungan Belanja Modal Bidang Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	29

2.2.5 Hubungan Belanja Modal Bidang Infrastruktur dengan IPM	30
2.2.6 Hubungan Belanja Modal Bidang Pendidikan dengan IPM	31
2.2.7 Hubungan Belanja Modal Bidang Kesehatan dengan IPM	31
2.3 Tinjauan Empiris.....	32
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian.....	35
2.5 Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	38
3.4 Metode Analisis Data	38
3.5 Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Penelitian	43
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	44
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.4 Uji Hipotesis	52
4.5 Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
Gambar 4.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2022 (Dalam Milyar Rupiah).....	47
Gambar 4.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2022 (Dalam Milyar Rupiah).....	48
Gambar 4.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2022 (Dalam Milyar Rupiah).....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2007-2021.....	5
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)	7
Tabel 4.1 Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi dengan Breuch-Godfrey Serial <i>Correlation LM Test</i>	52
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi Pada Persamaan Sub Struktural 1	53
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Pada Persamaan Sub Struktural 2.....	54
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Standardized Coefficient)	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari adanya pembangunan ekonomi disuatu daerah oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Boediono (1999) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif pada masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005), ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi.

Penyusunan APBD dimulai dengan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Darwanto, et al., 2007).

APBD adalah rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. (Halim & Kusufi, 2012).

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Pendapatan Daerah, semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pendapatan daerah terdiri atas, pertama pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, bagan laba usaha daerah dan lain-lainnya. Kedua, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, DAU, DAK,

dan perimbangan dari provinsi (khusus kab/kota). Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah meliputi objek pendapatan seperti; hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Belanja daerah, semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah terdiri atas; belanja administrasi umum (belanja tidak langsung), belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung), belanja modal, dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengangguran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kendali pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi terletak pada anggaran negara yang memuat jumlah dan tujuan anggaran tersebut digunakan. Salah satu pos anggaran di dalam APBN adalah belanja modal. Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010). Salah satu poin penting belanja modal yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah

pengadaan infrastruktur. Infrastruktur yang menyentuh kegiatan masyarakat bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Halim (2008), jenis belanja yang termasuk dalam kategori belanja Modal adalah 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 5) Belanja Aset Tetap lainnya, dan 6) Belanja Aset lainnya.

Menurut Mayeztika (2010), belanja modal dikelompokkan berdasarkan dua jenis belanja, yaitu:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance, pembangunan jalan raya dan jembatan.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya: belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan tingkat ekonomi terbesar kesembilan di Indonesia, Sulsel telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,8 persen setiap tahun. Angka ini hanya sedikit lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi secara keseluruhan, yakni 7,2 persen per tahun, tetapi jauh di atas rata-rata nasional sekitar 5,2 persen.

Memang ekonomi regional pulau Sulawesi telah tumbuh lebih cepat daripada pulau besar lainnya di Indonesia yang mencerminkan proses 'mengejar ketertinggalan' setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban.

Selama periode 2011 hingga 2019, ada beberapa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan; dan infrastruktur. Infrastruktur adalah pendorong ekonomi ketiga, karena pemerintah pusat dan provinsi berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan di seluruh daerah Sulsel, termasuk pembangunan Bandara Hasanuddin yang lebih besar, pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dan Pelabuhan Baru Makassar.

Adapun data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 15 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2007-2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)
2007	138 463,64	6.34
2008	149 241,89	7.78
2009	158 542,36	6.23
2010	171 740,74	8.19
2011	185 708,47	8.13
2012	202 184,59	8.87
2013	217 589,13	7.62
2014	233 988,05	7.54
2015	250 802,99	7.19
2016	269 401,31	7.42
2017	288 814,17	7.21
2018	309 156,19	7.07

2019	330 506,38	6.92
2020	328 158,57	-0.71
2021	343 402,51	4.64

Sumber:Badan Pusat Statistika (diolah)

Melihat dari tabel di atas, kita bisa lihat laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi pada 15 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam -0,71% dan tercatat sebagai yang terendah dalam 15 tahun terakhir akibat dari pandemi covid-19. Laju tersebut paling lambat, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel sejak tahun 2007. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Sulsel ditahun itu mencapai 6,34% lalu meningkat menjadi 7,78% pada tahun 2008, dan mengalami penurunan di tahun 2009 dengan laju pertumbuhan sebesar 6,23%, dan kembali mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2019 yaitu sebesar 8,19 pada tahun 2010, dan kembali turun menjadi 8,13% pada tahun 2011, serta mengalami kenaikan menjadi 8,87% pada tahun 2012, lalu menurun menjadi 7,62% pada tahun 2013, serta mengalami penurunan yaitu, 7,54% pada tahun 2014, dan kembali turun menjadi 7,19% pada tahun 2015, serta mengalaami kenaikan menjadi 7,42% pada tahun 2016, lalu kembali turun menjadi 7,21% pada tahun 2017, serta mengalami penurunan kembali di tahun 2018 menjadi 7,07%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 6,92%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,64% setelah mengalami kontraksi di tahun 2020.

Ekonomi Sulawesi Selatan kumulatif selama tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran,

pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,57 persen.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap menjadi unsur penting setiap program pembangunan yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Adapun data anggaran dan realisasi belanja modal dan belanja pegawai Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Tahun	Belanja Modal			Belanja Pegawai		
	Anggaran (M)	Realisasi (M)	Proporsi (%)	Anggaran (M)	Realisasi (M)	Proporsi (%)
2017	8.080,23	8.664,31	106,98	16.707,89	14.988,11	89,71
2018	8.427,73	7.836,45	92,94	16.703,92	15.381,59	92,08
2019	8.545,64	7.824,08	91,56	17.340,09	15.911,93	91,76
2020	8.685,62	6.811,54	78,42	17.481,02	15.859,74	90,73
2021	10.272,64	6.618,84	64,43	17.347,53	16.208,20	93,43

Data djpk kemenkeu (diolah)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa realisasi belanja modal 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 proporsi realisasi mencapai 106,98%. Proporsi realisasi anggaran terendah terdapat pada tahun 2021, dimana realisasi sebesar 64,43%. artinya realisasi anggaran lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan. Tahun 2018 proporsi realisasi anggaran sebesar 92,94% lebih rendah 14,04% dari tahun 2017. Tahun 2019 proporsi realisasi anggaran sebesar

91,56% lebih rendah 1,38% dari tahun. Tahun 2020 proporsi realisasi anggaran sebesar 78,42% dimana realisasi ini lebih rendah 13,14% dari tahun 2019 yaitu sebesar 6.811,54 milyar rupiah . Dapat juga dilihat dari realisasi 5 tahun terakhir mengalami trend yang menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa belanja pegawai 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana proporsi realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2021, dimana realisasi anggaran sebesar 93,43% serta proporsi realisasi anggaran terendah pada tahun 2017, dimana realisasi sebesar 89,71%. Tahun 2018 proporsi realisasi anggaran sebesar 92,08% lebih tinggi 2,37% dari tahun 2017. Tahun 2019 proporsi realisasi anggaran sebesar 91,76% artinya menurun sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 proporsi realisasi anggaran sebesar 90,73% artinya menurun sebesar 1,03% dari tahun 2019. Tahun 2021 proporsi realisasi anggaran sebesar 93,43% artinya meningkat sebesar 2,7% dari tahun sebelumnya.

Adapun pengeluaran pemerintah atas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut.

Pada penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilany Winda mandey, dkk, (2022) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas

kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Safira, dkk, (2019) mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten.

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu permasalahan pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sehingga ke depan kedepannya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar persentasenya untuk belanja pegawai dari pada belanja modal. Hal tersebut penulis menganggap bahwa perlu diadakan penelitian mengenai “ PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka akan disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal bidang infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah belanja modal bidang pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah belanja modal bidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui IPM di Provinsi Sulawesi selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui belanja modal bidang infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui belanja modal bidang pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui belanja modal bidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan serta dapat juga menjadi salah satu sarana untuk mendalami dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan menjadi referensi yang berguna untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya prodi Ilmu Ekonomi/Ekonomi

Pembangunan serta sebagai bahan perbandingan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu khususnya tentang Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, menurut Prof. Simon Kuznets. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan dimana para ekonom mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok teori yaitu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik, teori

pertumbuhan ekonomi modern dan teori pertumbuhan ekonomi endogen (Nurlina, 2004).

Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia (Sukirno, 2006).

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. Menurut Arsyad (1999) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak

syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier,1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dinamakan teori pertumbuhan klasik oleh karena dikemukakan oleh para ahli yang dikenal sebagai penganut aliran klasik. Teori ini meliputi teori pertumbuhan dari Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijaksanaan *laissezfaire* (kebijaksanaan pajak dan zakat) atas sistem dan mekanisme untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi suatu masyarakat (Salam, 2008).

Teori pertumbuhan Adam Smith (1776) mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas (Vivenza, 2002). Smith dan Richardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai akibat adanya pembentukan akumulasi modal yang bersumber dari adanya surplus dalam ekonomi. Namun demikian David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya dengan hanya mengandalkan modal, pada jangka panjang perekonomian akan menuju kepada keadaan yang stationer, yaitu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

Menurut Ricardo (1817), peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya *the law of diminishing return* karena teknologi adalah bersifat *rigid* (kaku) dan hanya dapat berubah dalam jangka panjang (Ssraffa, 2004). Bagi

kaum klasik, keadaan stasioner merupakan keadaan ekonomi yang sudah mapan dimana masyarakat sudah hidup sejahtera sehingga tidak diperlukan lagi pertumbuhan yang berarti (Yohana, 2010). Para ahli teori klasik berpendapat bahwa perekonomian suatu Negara dapat tumbuh dan berkembang jika dititikberatkan pada pasar, selain itu peran pemerintah sangat membantu laju perkembangan suatu negara.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini diwakili oleh teori pertumbuhan Joseph Schumpeter, Alfred Marshal, Robert Solow dan Trevor Swan. Pendapat penganut aliran neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, Perkembangan merupakan proses gradual, Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, Adanya pemikiran yang optimis terhadap perkembangan, Aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan (Suryana, 2000).

Menurut paham neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknologi tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga akan turun dan hasrat menabung turun. Dalam hal ini perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional.

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori ini adalah meliputi teori pertumbuhan Rostow, Kuznet dan teori Harrod-Domar. Menurut Rostow (1960) pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern

melalui tahapan sebagai berikut: Masyarakat tradisional (*the traditional society*), Prasyarat lepas landas (*the precondition for take-off*), Lepas landas (*the take-off*), Tahap kematangan (*the drive to maturity*), Masyarakat berkonsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*) (Suryana,2000).

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologi yang diperlukannya (Suryana,2000).

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen,yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Juhro, 2018) . Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neoklasik, seperti penjelasan mengenai *decreasing return to capital*, persaingan sempurna dan eksogenitas tehnologi dalam model pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Teori Pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam jangka panjang ditentukan dari dalam model dari pada oleh beberapa variabel pertumbuhan yang dianggap eksogen (Romer, 1994; Barrodan Martin,1999). Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik mengenai *diminishing marginal productivity of capital* dan konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Romer (1986) mengembangkan model pertumbuhan endogen sebagai

akibat dari adanya *knowledge externality*. Suatu perusahaan dapat lebih produktif dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut mempunyai rata-rata *stock knowledge* yang lebih tinggi dari pada perusahaan lainnya (Todaro, 2003).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) (BPS. 2010).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia. namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan. hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian. peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Harmawanti Marhaeni, Sri Yati, 2007) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Menurut Ramires dalam (Wicaksono, 2014) tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Adapun menurut Mankiw dalam (Nurmainah, 2013), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (on the job training) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Keynes (1936) tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat (AD) akan meningkat (Deliarnov, 2005). Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat

kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, oleh karena itu peranan pemerintah sangatlah penting.

Jenis belanja pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja baik negara maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota), pengeluaran dibedakan menjadi:

- a. Belanja operasi, rincian belanja operasi antara lain digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, subsidi, hibah dan belanja operasional lainnya.
- b. Belanja modal, digunakan untuk pembelian/pembentukan aset tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan aset tetap lainnya.
- c. Belanja tak terduga, merupakan belanja tidak terduga yang sebelumnya tidak dianggarkan seperti penanganan bencana.

Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap

menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut, Banga (2017) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordriawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD. Besaran nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ banun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). Dalam lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33

Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Belanja modal berkaitan erat dengan istilah investasi. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat berarti bermacam-macam, tergantung dari konteks mengartikannya. Dalam bahasa akuntansi pada konteks belanja, investasi dapat timbul dari adanya perbedaan antara revenue expenditure dan capital expenditure. Dalam membahas belanja modal, maka istilah yang digunakan adalah capital expenditure karena memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sularso dan Restianto, 2012).

Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, antara lain: belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Dengan adanya belanja modal tersebut diharapkan adanya multiplier effect, secara makro dan mikro bagi perekonomian nasional, dan khususnya bagi daerah (Halim, 2013).

2.1.5 Belanja Modal Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Todaro (2004) mengemukakan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi tingkat perluasan pembangunan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks makroekonomi, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi

marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks mikro berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Merujuk pada publikasi World Development Report infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang cukup baik.

Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting

untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan resiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang, dan pembangunan.

2.1.6 Belanja Modal Bidang Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah.

Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan

masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Menurut E.Setiawan (2006) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.7 Belanja Modal Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa

modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (E.Setiawan, 2006).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel independen (belanja modal bidang infrastruktur, belanja modal bidang pendidikan, dan belanja modal bidang kesehatan) terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi) di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1 Hubungan IPM dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam hal ini menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Hubungan Belanja Modal Bidang Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi. Salah satu pengaruh pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur seperti jalan yang memadai, adanya listrik, dan air bersih yang mencukupi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa sektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam

pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan disuatu negara terjadi.

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan oleh Deni Friawan, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Kedua, infrastruktur merupakan faktor utama dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Ketiga, perbaikan dalam infrastruktur sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga akan mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

2.2.3 Hubungan Belanja Modal Bidang Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori *human capital*, modal manusia merupakan salah satu modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik dan sumberdaya alam dalam menciptakan output di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai seseorang maka produktivitas orang tersebut akan semakin tinggi pula. Dengan demikian, peningkatan modal manusia sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan adanya perhitungan rate of return dari bentuk investasi terhadap sumberdaya manusia yang dihasilkan. Jika rate of return yang dihasilkan baik, maka investasi sumber daya manusia yang dilakukan tergolong bermanfaat dan menghasilkan sumberdaya yang berkualitas.

Faktor pendidikan merupakan dasar dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi individu dan terserapnya teknologi modern yang dapat meningkatkan produksi sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Hubungan Belanja Modal Bidang Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal atas kesehatan merupakan salah satu cara pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan anggaran pengeluaran pemerintah, pemerintah dapat menyediakan layanan publik baik berupa sarana dan prasarana kesehatan. Perbaikan layanan kesehatan masyarakat merupakan bentuk investasi pada sumber daya manusia untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera lebih produktif serta dapat meningkatkan pendapatannya.

Terkait dengan teori human capital, bahwa modal manusia berperan signifikan bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat.

Kesehatan merupakan salah satu investasi manusia untuk menuju populasi yang sehat. Dengan tingkat kesehatan yang tinggi maka kapasitas

produksi setiap individu akan meningkat. Disamping itu juga kesehatan merupakan faktor inti dalam kesejahteraan yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi.

2.2.5 Hubungan Belanja Modal Bidang Infrastruktur dengan IPM

Dampak dari infrastruktur dengan pembangunan beragam polanya. Ada infrastruktur yang menunjukkan dampaknya pada penurunan biaya produksi, hingga mempengaruhi secara tidak langsung yaitu dengan meningkatkan kesehatan dari setiap individu. Infrastruktur meningkatkan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kembali produksi pelayanan kesehatan yang pada lanjutnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan meningkatkan produktivitas pekerja dan output ekonomi. Lebih lanjut, pembentukan dari hal tersebut dapat meningkatkan dari kualitas efektivitas pekerja selain dari daya kemampuan pendidikannya (Agenor, 2010).

Transportasi darat berperan krusial dari kegiatan masyarakat setiap harinya. Perpindahan serta pergerakan individu membutuhkan akses infrastruktur yang memadai. Infrastruktur pun dapat dilihat dari kegunaannya untuk menghubungkan akses-akses dasar kepada masyarakat seperti fasilitas ekonomi, kesehatan, sosial serta pendidikan. Kualitas infrastruktur jalan yang buruk dapat menghambat akses masyarakat terhadapnya. Ketersediaan sekolah yang mencukupi pada masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan pada masyarakat, hingga pada suatu yang mencukupi akan membuat taraf pendidikan minimal pada masyarakat setara. Puskesmas berperan untuk meningkatkan kualitas kesehatan suatu masyarakat dikarenakan kemampuannya yang berfungsi untuk menyembuhkan seseorang sehingga meningkatkan angka harapan hidup individu, tingkat ketersediaan puskesmas menandakan kemampuan puskesmas untuk melayani masyarakat sehingga semua dapatkan

akses pelayanan puskesmas yang efektif. Maka ketersediaan infrastruktur rumah sakit, sekolah, dan jalan meningkatkan kualitas sosial-ekonomi yang tercermin pada IPM.

2.2.6 Hubungan Belanja Modal Bidang Pendidikan dengan IPM

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan Pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

2.2.7 Hubungan Belanja Modal Bidang Kesehatan dengan IPM

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2015).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

2.3 Tinjauan Empiris

Ahmad Fajri (2016) "Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan rentang waktu (time series) selama 5 tahun yakni dari tahun 2009-2013 yang meliputi data belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menurut provinsi-provinsi di Sumatera. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa laju perkembangan belanja modal tertinggi diperoleh Provinsi Lampung sebesar 41%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bangka Belitung masing-masing sebesar 18%. Sedangkan perkembangan belanja modal terendah diperoleh Provinsi Aceh sebesar -4%. Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Ini menunjukkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.

Mukarramah, Cindy Yolanda, dan Muhammad Zulkarnain (2019) "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur". Data yang digunakan dalam penelitian ini data time series dengan runtut waktu dari tahun 2005-2015. Hasil penelitian dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa, secara simultan belanja modal dan indeks pembangunan manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian secara simultan belanja modal dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan serta secara simultan belanja modal dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Said Yunus dan Amirullah (2019) "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh)". Penelitian menggunakan data sekunder dari tahun 2011 sampai tahun 2017 terdiri dari data belanja modal dan pendapatan asli daerah serta pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis Data menggunakan persamaan Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian diketahui bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 37,6% belanja modal dan Pendapatan Asli

Daerah dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan sebesar 62,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Puput Waryanto (2017) "Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia". data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data time series selama 26 tahun mulai 1990 sampai dengan 2015 di Indonesia, penelitian ini telah membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

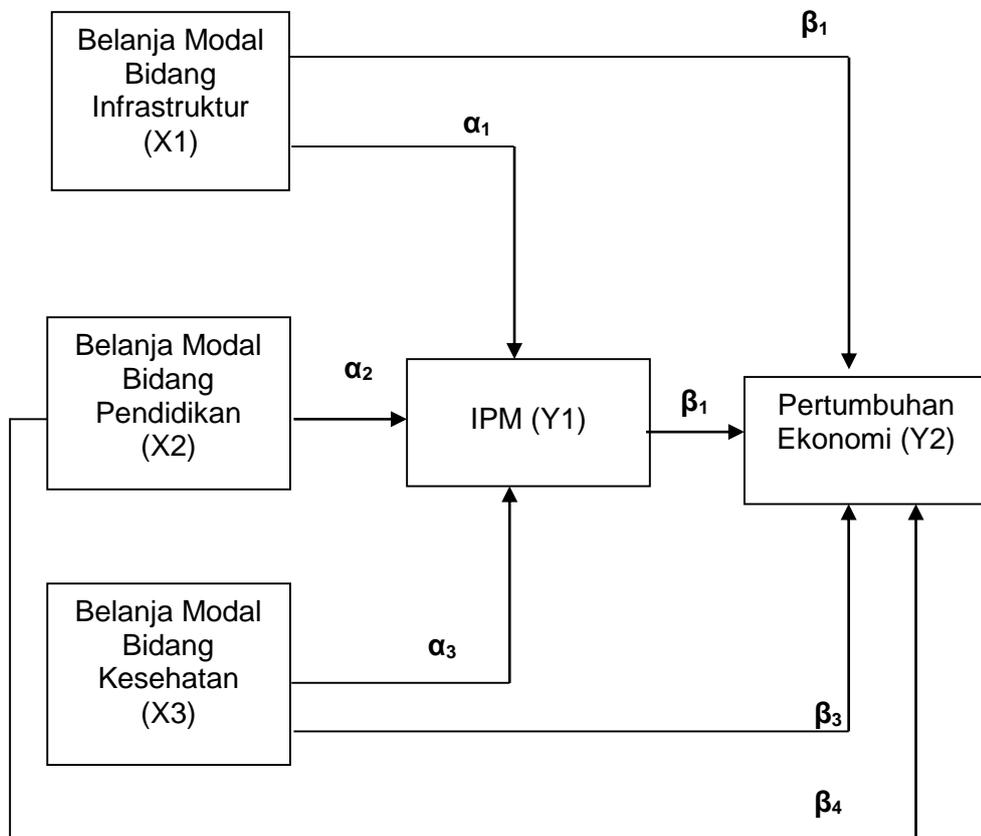
Santi Nurmainah (2013) "Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, penelitian ini menggunakan data panel. Data ini dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling dengan AMOS 20 Program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan diterima dan hipotesis ditolak. Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2 menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis 5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Belanja modal bidang infrastruktur membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan berbagai programnya untuk melaksanakan programnya seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih sehingga belum mampu memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi, dikarenakan untuk pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tidak dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, karena pembangunan infrastruktur memerlukan waktu cukup panjang untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sedangkan belanja modal bidang pendidikan merupakan investasi yang berujung memperbaiki kualitas manusia, pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, belanja modal bidang pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi pendidikan untuk mencapai pembangunan. Serta belanja modal bidang kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia adalah ketika pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun, begitupun sebaliknya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dipengaruhi oleh beberapa

faktor diantaranya adalah (1) belanja modal bidang infrastruktur, (2) belanja modal bidang pendidikan, (3) belanja modal bidang kesehatan, (4) indeks pembangunan manusia (IPM), dan (5) pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel tersebut dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga belanja modal bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Diduga belanja modal bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia (IPM).
3. Diduga belanja modal bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia (IPM).